Lawan Tangguh Pemimpin Baru

Oleh: Gatut Priyowidodo, Ph.D

Bulan Oktober 2019 seolah penanda waktu negeri ini sedang berbenah menyambut pemimpin baru. Ada 711 orang dilantik menjadi anggota MPR per 1 Oktober. Mereka terdiri dari 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD. Lima tahun kedepan (2019-2024) sepak terjang mereka akan mewarnai lanskap politik Indonesia. Hiruk pikuk rebutan posisi pemimpin tidak seheboh 2014 lalu ketika dua koalisi yakni Merah Putih (KMP) dan Indonesia Hebat (KIH) saling berhadapan secara diametral.

Meski tidak menjadi pemenang Pemilu, KMP merebut semua pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dari Komisi hingga pucuk pimpinan. Nyaris, mereka yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat yang notabene pendukung Presiden Jokowi-JK yakni PDI Perjuangan dan sekutunya tidak mendapat apa-apa sebelum ada revisi UU MD3. Siasat jahat begitu vulgar dipertontonkan kehadapan panggung rakyat, hanya karena nafsu pamer siapa yang lebih cerdik berpolitik.

Politik memang seni bertarung. Seni mendapatkan untung kekuasaan. Jika dapat melibas semua, untuk apa disisakan kepada lawan. Fatsun politik untuk menjaga martabat dan mengapresiasi kerja politik dengan cara *political sharing*, sejatinya tidak harus dipenuhi. Karena faktanya politik harus saling mengalahkan, kalau naluri berkuasanya memang kuat. Segala bentuk hardikan melalui beragam wajah perangkap yang menjatuhkan, harus sedapat mungkin ditepis dan dimatikan.

Itu kalau politik dimaknai sebagai menang-menangan *(the winner taken all)*. Rupa jahatnya begitu sadis. Tapi politik juga bisa dieja sebagai pertarungan yang bermartabat. Merangkul lawan sebagai kawan. Membangun bangsa secara bersama di atas sendi persaudaraan yang agung. Pluralitas politik dimaknai sebagai kekayaan yang saling melengkapi. Meski masih muda, ajakan Puan Maharani (46) sebagai Ketua DPR RI perempuan pertama agar dalam pengisian AKD tidak ribut atau *udur-uduran* patut diapresiasi. Semua dibagi secara proporsional berdasarkan perolehan kursi. Yang besar mendapat lebih, yang kecil sedikit. Sehingga kerja anggota legislatif diharapkan bisa lebih produktif.

Sejarah berikutnya adalah 20 Oktober 2019. Belum cukup sebulan parlemen bekerja, MPR pun melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Jokowi-KH Ma'ruf Amin tidak punya banyak waktu lagi, harus menghela pedati bangsa ini melaju kencang. Bukan saja persoalan domestik yang tak kunjung reda yang harus dituntaskan, tapi juga bayang-bayang resesi global terus semakin dekat mengintip.

Periode kedua Presiden Jokowi mengusung *tagline* Indonesia Maju. Artinya apa? Pemimpin harus menjadi inspirasi positif bangsa ini untuk

menebar optimisme. Presiden pilihannya harus berkomunikasi dengan generasi milineal yang bersama-sama mengisi dan mengasah kecakapan menyongsong tahun 2045. Tahun dimana Indonesia memiliki potensi jumlah penduduk sudah mencapai angka 319 juta orang. 47% diantaranya adalah usia produktif. Bekerja dan menghasilkan sesuatu. 70% kategori kelas menengah. 73% mereka berkegiatan di sektor jasa dan tinggal di perkotaan. Pendapatan per kapita sudah mencapai angka US$ 23.199 atau hampir US$ 2 ribu/bulan.

Posisi Strategis

Konstruksi prospektif bangsa yang luar biasa ini harus dirawat secara baik. Optimisme bukan berarti tidak waspada. Ancaman tidak suka jika bangsa ini menjadi bangsa besar begitu dekat. Nah di sinilah letak posisi strategis pemimpin baru baik di level legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Bagaimana membekali generasi milenial yang a historis dengan segala hal berkait dengan perjuangan bangsa di era kolonial ataupun kesulitan hidup pada era Orde Lama tetap menjadi spirit untuk maju tapi juga mencintai bangsa ini secara sungguh-sungguh. Beragam tapi tetap satu. Tidak mudah terpecah belah. Mau menghargai perbedaan etnik, agama, ras, antar golongan dan juga pandangan politik.

Upaya-upaya kelompok radikal Islam yang terus mengarahkan kiblat bangsa ini ke rengkuhan sistem pemerintahan khilafah islamiyah tak kunjung padam. Bahkan hasil survei SMRC (2017) sebelum Pemilu menempatkan angka 9,2% setuju Indonesia cocok sistem khilafah tersebut. Jika jumlah pemilih 190 juta maka plus minus ada 20 jutaan yang terafiliasi ingin mewujudkan NKRI dengan sistem tersebut. Begitupun suara dari pelajar dan mahasiswa menurut Alvara mencapai angka 20 % yang setuju khilafah (https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2017/11/02/hasil-survei). Tidak hanya itu ternyata PNS yang setuju ide Negara Islam itu mencapai 19,4%. Alamaak!! Indonesia darurat ideologi. Pancasila dengan nilai-nilai yang baik khas Indonesia ternyata mendapat lawan tangguh ideologi kanan yang sangat mungkin secara klandestin merayap mengakumulasi kekuatan.

Secara formal pengusung khilafah yakni HTI (Hizbut Thahrir Indonesia) sudah dibekukan. Tapi sebagai kekuatan ideologis, mereka pasti tidak tinggal diam ketika organisasi struktural mereka dilarang. Sedikit saja ada kesempatan untuk unjuk kekuatan pasti secara maksimal mereka gunakan. Ketika gelombang demonstrasi mahasiswa menuntut pencabutan RKUHP, RUU KPK, Isu Lingkungan, Revisi UU Naker, UU PKS, Pertanahan dan kriminalisasi aktivis akhir September 2019 lalu, apakah mereka benar-benar tahu yang mereka perjuangkan? Jujur di kelas sayapun bertanya kepada mahasiswa, sebetulnya apa yang mahasiswa tuntut? Mereka mengaku tidak tahu.

Pertanyaannya lalu siapa yang menggerakan mereka? Secara hipotetis jawabannya pasti sebagian dari anasir bangsa ini yang tidak senang Indonesia maju. PR besar pemimpin baru adalah meyakinkan bahwa dari masa ke masa mereka yang berkiblat khilafah semakin berkurang. Jangan sampai Suriah yang porak poranda itu menjadi mimpi buruk Indonesia kedepan. Ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir cita-citanya adalah hidup sebagai bangsa yang merdeka dan makmur. Demikian pula ketika Presiden Jokowi memimpin bangsa ini, harapannya Indonesia akan lebih mandiri, maju dan makmur dibawah Pancasila sebagai ideologi yang menghormati keragaman dan anti intoleransi.

***Gatut Priyowidodo, Ph.D** Ketua Pusat Kajian Komunikasi Petra (PKKP) dan Dosen Tetap Program Studi Ilmu Komunikasi UK Petra Surabaya.